

Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

No. HM.4.6/04/SET.M.EKON.2.3/01/2020

Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja

Jakarta, 21 Januari 2020

Sehubungan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa terkait RUU Penciptaan Lapangan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu menjelaskan beberapa hal.

1. RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah. *Draft* RUU yang beredar berjudul “Penciptaan Lapangan Kerja”, sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul “Cipta Lapangan Kerja”. Sehingga apabila ada *Draft* RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, maka bisa dipastikan bukan *Draft* RUU dari Pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarkan *draft* RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai.

3. Sesuai mekanisme penyusunan Undang-Undang, Pemerintah sudah merampungkan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional. Berdasarkan informasi jadwal Sidang di DPR RI, hari ini DPR RI akan menetapkan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.
4. Setelah DPR RI menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, Pemerintah segera menyiapkan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR RI.
5. Presiden akan menyampaikan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI, disertai dengan *draft* Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja. Sampai saat ini Surat Presiden tersebut belum disampaikan.
6. Pemerintah tetap memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI.
7. Seperti diketahui, RUU Cipta Lapangan Kerja adalah terobosan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, untuk menghasilkan investasi baru sehingga dapat menampung 9 juta calon pekerja demi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Maju. (ekon)

**Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono**

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id